

PENGANTAR KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAHAN PASCA UU CIPTA KERJA (Edisi Revisi)

Lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjadi dasar berpijak badan/pejabat pemerintah dalam melakukan tindakan diskresi. Diskresi mempunyai unsur-unsur yaitu diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan, keputusan dan/atau tindakan itu ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan, tujuannya untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, diskresi dilakukan dalam hal penentuan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Selain itu, diskresi bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum, semua itu dalam proses meningkatkan pelayanan bagi masyarakat serta dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Buku ini tentu, masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kelimauan kami, akan tetapi inilah sumbangsih yang dapat berikan sebagai akademisi. Berbagi ilmu, dan berbuat baik, walaupun itu sedikit, dari pada tidak sama sekali. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua orang dan bagi kami sendiri untuk pengembangan hukum administrasi.

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Agustina Wati, S.H., M.H.
Ine Ventyrina, S.H., M.H.

CV PENERBIT
Muhammad
Fahmi Al Azizy



PENGANTAR KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAHAN PASCA UU CIPTA KERJA

Edisi Revisi

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Agustina Wati, S.H., M.H.
Ine Ventyrina, S.H., M.H.



CV PENERBIT
Muhammad
Fahmi Al Azizy

Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan Pasca UU Cipta Kerja

PENGANTAR
KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAHAN
PASCA UU CIPTA KERJA
(Edisi Revisi)

Penulis :

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Agustina Wati, S.H., M.H.

Ine Ventyrina, S.H., M.H.

Editor :

Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

CV PENERBIT
Muhammad
Fahmi Al Azizy

2023

**PENGANTAR KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAHAN
PASCA UU CIPTA KERJA (EDISI REVISI)**

Copyright © CV. Muhammad Fahmi Al Azizy 2023

Hak cipta ada pada penulis

x + 172 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

ISBN : 978-623-8127-07-8

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.,
Agustina Wati, S.H., M.H.
Ine Ventyrina, S.H., M.H.,
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
Penyunting : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Produksi : Lingkar Media Jogja

Diterbitkan tahun 2023 oleh:

CV. Muhammad Fahmi Al Azizy

Bandung Rt. 30 No. 163, Pendowoharjo, Sewon, Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta

Tlp. 085725782088

Anggota IKAPI

Pencetak:

Lingkar Media

Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul, Yk

Telp. /WA: 0857 1285 3858

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta

CV PENERBIT
Muhammad
Fahmi Al Azizy

2023

KATA PENGANTAR

Berbagi sedikit ilmu, itulah motivasi utama kami, untuk menulis buku Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan. Ini ditandai atas minimnya buku-buku text yang terkait dengan diskresi. Perkembangan hukum administrasi menjadi minat studi di Fakultas Hukum Universitas Mulawaman, tidak didukung dengan perkembangan buku text sebagai literatur yang menunjang keilmuan Hukum administrasi.

Lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjadi dasar berpijak badan/pejabat pemerintah dalam melakukan tindakan diskresi. Diskresi mempunyai unsur-unsur yaitu diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan, keputusan dan/atau tindakan itu ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan, tujuannya untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, diskresi dilakukan dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Selain itu, diskresi bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum, semua itu dalam proses meningkatkan pelayanan bagi masyarakat serta dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Buku ini tentu, masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kelimuan kami, akan tetapi inilah sumbangsih yang dapat berikan sebagai akademisi. Berbagi ilmu, dan berbuat baik, walaupun itu sedikit, dari pada tidak sama sekali. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua orang dan bagi kami sendiri untuk pengembangan hukum administrasi.

Kepada keluarga kami, terima kasih atas segala motivasi, doa, dan semangat untuk penyelesaian buku ini. Ucapan terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam penerbit buku, kami ucapkan terimakasih. Sesuatu yang indah, jika kita bisa menorehkan karya dalam tulisan yang menginspirasi sesama.

Samarinda, 12 Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian kekuasaan diskresi pemerintahan	1
1.2. Prasyarat dalam menggunakan Kekuasaan Diskresi Pemerintah	19
1.3. Pembatasan dalam Kekuasaan Diskresi Pemerintahan.....	28
1.4. Sejarah Kekuasaan Diskresi Pemerintahan	34
BAB II	
KONSEP KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAH	50
2.1. Hakikat Kekuasaan Diskresi Pemerintahan	50
2.2. Asas Hukum Umum dalam Kekuasaan Diskresi Pemerintahan	57
2.3. Asas-asas Hukum yang Membatasi Penerapan Kekuasaan Diskresi Pemerintah	64
2.4. Dasar pengujian terhadap pelaksanaan kekuasaan diskresi pemerintah	65
2.5. Konsep Kekuasaan Diskresi Pemerintahan berdasarkan Undang- Undang Administrasi Pemerintahan	71
BAB III	
PENGATURAN KEKUASAAN DISKRSI PEMERINTAHAN	73
3.1. Pengaturan di UUD NRI Tahun 1945	73
3.2. Pengaturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kekuasaan Diskresi Pemerintahan	77
3.3. Peraturan Pemerintah yang Terkait dengan Kekuasaan Diskresi Pemerintahan	90
DAFTAR PUSTAKA	96
GLOSARIUM	102
INDEXS	106
BIODATA PENULIS	110